

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mengakui dan menjamin hak asasi warga negaranya. Ada beberapa hak asasi manusia yang diatur oleh konstitusi yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Pasal 28, 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945 (yang kemudian disingkat menjadi UUD 1945).

Dalam hal mendapatkan hak-hak tersebut seperti hak untuk mendapat jaminan dan kepastian hukum, ada asas *equality before the law* yang merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtsstaat*) sehingga harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang didepan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Pada dasarnya elemen yang melekat mengandung makna perlindungan yang sama didepan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum (*equal justice under the law*)¹.

Salah satu bentuk keadilan yang sama di depan hukum adalah penjatuhan pidana yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Walaupun pembentuk undang-undang memberikan

¹ Lilik Mulyadi, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm.14

kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap². Terutama dalam penjatuhan pidana mati. Karena persoalan pidana mati adalah persoalan mengenai menghilangkan nyawa seseorang secara sah melalui pihak yang berwenang karena melakukan kejahatan-kejahatan berat³. Pidana mati secara pasti diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP) maupun undang-undang khusus lainnya. Tata cara pelaksanaan pidana mati pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 2 PNPS Tahun 1964. Pengaturan tersebut ditujukan untuk mengatur tentang pihak yang berwenang melakukan eksekusi, alat yang digunakan serta tata cara eksekusinya.

Salah satu undang-undang khusus yang mengatur pidana mati sebagai ancaman pidananya adalah undang-undang tentang permasalahan tindak pidana narkoba. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba⁴ yang dalam Pasal 153 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena undang-undang yang lama dianggap

²*Ibid*, hlm. 141

³Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2014. *Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1

⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan ngolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

tidak lagi mampu memberantas pelaku tindak pidana narkoba yang selalu memiliki strategi-strategi baru dalam memasarkan narkoba. Pembentukan undang-undang tersebut juga merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba dan psikotropika. Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya⁵. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang ratifikasi protokol PBB menentang Kejahatan Lintas Negara yang terorganisir, dimana Undang – Undang tentang Narkoba termasuk didalamnya dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena sebagian besar penyalahgunaan narkoba melibatkan jaringan yang ada di negara lain⁶.

Mengingat tindak pidana narkoba yang sudah bersifat transnational crime maka ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142, memuat ancaman tidak hanya berupa pidana mati tetapi pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana mati sendiri diatur dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat 9 (2), Pasal 118

⁵ Aziz Syamsudin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.89-90

⁶ Dikutip dari <http://papuahhttp.blogspot.co.id/2014/10/narkoba-sebagai-transnational-organized.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2016 Pukul 9.15 Wib

ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penjatuhan pidana mati yang diancamkan kepada pelaku penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dalam praktek penjatuhannya masih sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dengan yang tidak setuju. Perdebatan tersebut telah berlangsung berabad-abad lamanya. Ada beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ada juga yang menentang eksistensi pidana mati. Tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati diantaranya Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan “pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan Hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar”⁷.

Para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidak sedikit yang menyandarkan argumennya pada landasan berpikir yang ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kekokalannya menentang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Beccaria. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah). Setelah keharuman nama Beccaria tenggelam, maka muncullah nama-nama tokoh dan ahli yang menentang pidana mati. Adapun

⁷ Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tulisan dalam JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMAJAYA, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/5236/1/JURNAL%20ILMIAH.pdf> tanggal 8 November 2015, hlm. 8

nama-nama tersebut adalah Ferri, Leo Polak, Modderman dan tokoh lainnya, sedangkan di Indonesia tokoh yang sangat vokal menentang pidana mati ialah Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulia Lubis yang semenjak muda telah terang-terangan menolak keberadaan pidana mati.⁸

Di Indonesia sendiri pidana mati telah lama dikenakan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang bersifat tertulis hingga akhirnya setelah tanggal 1 Januari 1918 *Wetboek van Strafrecht* (WvS) berlaku di Indonesia⁹. Pidana mati tetap diberlakukan di Indonesia meskipun di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870. Tujuan masih diberlakukannya pidana mati adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan karena dari aspek kemanusiaan, pidana mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan jahat¹⁰.

Sepanjang tahun 2015, sudah 12 orang terpidana mati yang dieksekusi dari 14 orang terpidana mati di Indonesia. Dua orang tersebut ditunda pelaksanaannya karena persoalan hukum lain. Salah satu terpidana mati yang telah dieksekusi tersebut adalah Rani Andriani. Rani Andriani dieksekusi di Nusakambangan pada hari Minggu, 18 Januari 2015. Rani Andriani adalah pelaku tindak pidana narkoba yang bertempat tinggal di Ciajur, Jawa Barat dan masih berumur 25 tahun.

Rani diputus hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2002 dengan Nomor Putusan 255/PID/B/2000/PN.TNG. Jaksa Penuntut Umum mendakwanya dengan dakwaan kumulatif yang mana dakwaan Primair

⁸*Ibid*, hlm.10

⁹Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. *Op.cit.* hlm. 30

¹⁰Oksudelfa Yanto, *Hukuman mati dan Efek Jera*, diakses di <https://danielpinew.wordpress.com/perpustakaan/hukum/hukuman-mati-dan-efek-jera/> Pada Tanggal 28 Desember 2015 Pukul 20.14

melanggar Pasal 82 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana dalam pasal ini berisi ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dakwaan subsidair Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana dalam pasal ini berisi ancaman pidana penjara 15 tahun dan denda Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) dan dakwaan lebih subsidair Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana dalam pasal ini berisi ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Rani Andriani alias MELISA APRILIA bersama Meirike Franola alias Ola alias Rika alias TANIA MAY alias CINBE FRANSESCA (Ola) dan Deni SETIA MAHARWAN alias RAPI MUHAMED MAJID (Deni) telah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, Jenis Heroin sebanyak 3,5 kilogram. Rani diminta untuk berangkat ke London. Sesuai perintah Ola, pada hari keberangkatan Rani bertemu dengan Ola di McDonald Bandara Soekarno Hatta untuk memindahkan semua pakaian Terdakwa yang dibawa dalam tas dan sudah berisi narkotika golongan I (Jenis Heroin) yang dipindahkan oleh Ola ke dalam koper berwarna hitam yang dibawa Ola bersama Deni. Rani tertangkap tangan oleh Polisi di bandara yang sudah mencurigainya pada saat Rani diantar oleh Ola menuju Counter Pemberangkatan dan setelah itu Ola kembali

ke Mc.Donald. Polisi menangkap Rani untuk dilakukan penggeledahan terhadap koper hitam dan tas tangan yang dibawanya. Pada saat penggeledahan tersebut, Polisi menemukan narkoba jenis Heroin dan Rani mengakui perbuatannya pada saat penggeledahan tersebut bahwasannya narkoba tersebut akan dibawa ke London. Dalam kesaksiannya dipersidangan, Rani Andriani mengatakan pada saat itu dia terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena untuk melindungi temannya dari penganiayaan jika tidak melakukan hal yang diperintahkan.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, menuntut terdakwa dengan dengan pidana penjara seumur hidup dan membayar denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan. Jika dicermati, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu dalam Putusan juga memuat hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dimana hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah hal-hal umum yang merupakan tujuan dipidanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Hakim mengabaikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu terdakwa dipersidangan mengakui terus terang, belum pernah dihukum, menyesal atas perbuatannya dan masih muda yaitu berumur 25 tahun apabila ditinjau dari seluruh perbuatan terdakwa. Hal-hal tersebut yang menurut hemat penulis dapat menjadi alasan pidana yang dijatuhi dapat dikurangi sehingga terdakwa tidak seharusnya dipidana dengan ancaman pidana maksimum dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti

pertimbangan Hakim pada putusan Nomor. 255/PID/B/2000/PN.TNG. Penulis tertarik meneliti hal-hal yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa meskipun Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan alasan Majelis Hakim mengabaikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Karenanya menjadi signifikan untuk bicara tentang persepsi Hakim dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah penulis membahas permasalahan ini dalam bentuk studi kasus hukum yang kemudian penulis beri judul:

**“PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MATI
TERHADAP PENGEDAR (Putusan Nomor.
255/PID/B/2000/PN.TNG)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati dalam putusan Nomor. 255/PID/B/2000/PN-TNG
2. Apakah landasan yuridis yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga untuk menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam pemberian pidana terhadap terdakwa Rani Andriani pada tahun 2002.
2. Untuk mengetahui ketentuan yang digunakan oleh Hakim dan bagaimana Hakim dalam menerapkan, menafsirkan ketentuan hukum sehingga menemukan logika hukum dalam memutus perkara.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini kita mengetahui hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam pemberian sanksi dan menjadi acuan untuk mengefektifkan pemberian sanksi dan memperbaiki kelemahan dari pemberian sanksi selama ini.

2. Manfaat Praktis.

- a. Dapat mengetahui teori dan pertimbangan-pertimbangan yang biasanya digunakan Hakim dalam membuat putusan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka menetapkan putusan yang memberikan efek jera kepada pelaku narkoba dan psikotropika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab permasalahan diatas, ada beberapa teori yang berkaitan yaitu :

1. 1. Teori Pidana

Penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pada akhirnya berakibat pada tidak tercapainya tujuan hukum. Menurut L.J. Apeldoorn dalam bukunya "*inleiding tot de studie van het nederlandsch recht*" menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai¹¹, untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat diatur beberapa perbuatan yang dianggap akan merusak ketertiban tersebut yang disebut dengan tindak pidana.

Hukum pidana sebagai konsekuensi daripada perbuatan manusia yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku. Sehingga akibat yang diderita oleh perbuatan itu bagi orang yang melakukan adalah sanksi hukum sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan yang baik¹² dan terbentuk ketertiban dalam masyarakat.

Berbicara tentang sanksi hukum pidana ada beberapa teori yang menyertainya yang lebih sering dikenal dengan teori

¹¹ Said Sampara dkk, 2009. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Total Media, hlm.42

¹² Mokhamad Najih dan Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, hlm.150-151

pemidanaan, yaitu : ¹³

1. **Teori mutlak (pembalasan)**, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

menurut **Johannes Andenaes**, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan menurut

Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*) yaitu¹⁴:

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *Quantutative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuanlain dari

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm.10-17

¹⁴Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 188

pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, **Herbert L. Packer** berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut yaitu *revenge theory* atau yang bisa disebut dengan teori balas dendam yang menganggap pidana sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelaku dan *expiation theory* atau teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya¹⁵.

2. **Teori relative (teori tujuan)**, teori ini berpendapat memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan kejahatan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui penjatuhan sanksi pidana untuk membalas perbuatan pelaku, juga

¹⁵*Ibid*, hlm. 189

dimaksudkan agar pelaku dapat memperbaiki diri sehingga bisa kembali ke masyarakat¹⁶.

1. 2. **Penyertaan (*Deelneming Delicten*)**

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai *deelneming*, yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*)¹⁷. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang merumuskan 5 peranan pelaku, yaitu¹⁸.

a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)

Yang dimaksud dengan pelaku (*dader or doer*) adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yakni:

- Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
- Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang

¹⁶*Ibid*, hlm. 191

¹⁷*Ibid*, hlm. 122

¹⁸Leden Marpaung. 2009. *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78-90

memiliki unsur kedudukan atau kausalitas sebagaimana yang dirumuskan.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Ajaran ini disebut dengan *middliedaderschap* karena diartikan sebagai pelaku tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan atau “tidak dapat dihukum” merupakan pedoman para pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan delik tersebut. **Prof. Simons** mengutarakan bahwa orang yang disuruh melakukan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan;
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai

unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana diatas;

- Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh *overmacht*.
- Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
- Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu tidak mempunyai sifat tertentu seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang.

c) Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang turut melakukan. Seorang *mededader* harus memenuhi dua syarat yaitu harus ada kerja sama secara fisik dan kesadaran kerja

sama.

d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Uitlokking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP. Perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. **Prof. Simons** menyatakan bahwa “membantu” harus memenuhi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terpenuhi apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan sedangkan unsur objektif adalah apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya kejahatan.

1. 3. Dasar Pertimbangan Hakim

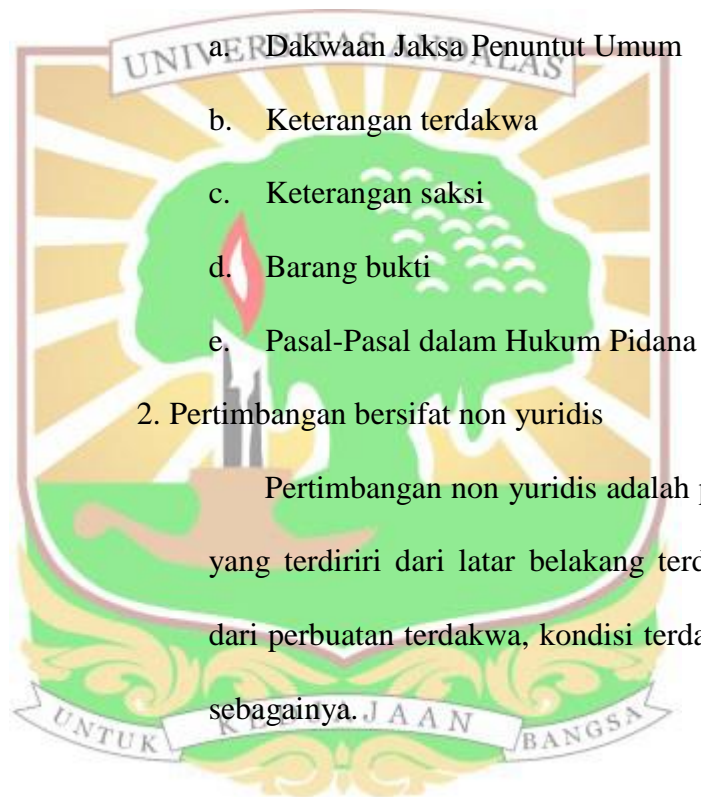
Dasar pertimbangan Hakim menurut **Rusli Muhammad**

terdiri dari dua kategori Pertimbangan Hakim¹⁹, yaitu:

1. Pertimbangan bersifat yuridis

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang bersumber dari fakta-fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan Hakim

. Pertimbangan tersebut adalah:



- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang bukti
- e. Pasal-Pasal dalam Hukum Pidana

2. Pertimbangan bersifat non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan lain sebagainya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala tersebut biasa dinamakan fakta,

¹⁹Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, hlm. 124-136

sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut²⁰.

Kerangka konseptual dalam penelitian hukum ada yang dari peraturan perundang-undangan dan metode untuk merumuskan pengertian-pengertian hukum²¹. Adapun pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan penulisan ini adalah:

a. Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak gerak tingkah laku dan gerak gerak jasmani seseorang. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dari defenisi diatas terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. unsur objektif, terdiri dari :

1. sifat melanggar hukum
2. kualitas dari sipelaku
3. kausalitas atau hubungan sebab akibat sipelaku melakukan tindak pidana

b. unsur subjektif, terdiri dari :

1. kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

²⁰ Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia(UI-Press), hlm.132

²¹ *Ibid*, hlm. 141-143

2. maksud pada suatu percobaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, dsb.
4. merencakan terlebih dahulu
5. perasaan takut seperti yang dimaksud dalam Pasal 308 KUHP²²

b. ***Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika***

Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam UU Narkotika. Pasal 1 angka 6 Ketentuan Umum UU Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. ***Pelaku Tindak Pidana***

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan

²² Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Raja Grafindo, hal. 49-51

Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia²³.

d. ***Sanksi Pidana***

Sanksi dalam hukum pidana adalah berupa ancaman hukuman, bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan kepentingan hukum yang telah dilanggar oleh seseorang. Yang mana kepentingan hukum (*rechtsbelang*) tersebut adalah hidup, badan, kehormatan, kebebasan dan hak milik. Sanksi pidana mati yang dilakukan dengan cara mengambil jiwa seseorang yang melanggar undang-undang²⁴.

Stelsel pidana Indonesia yang pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh dalam beberapa peraturan telah merinci jenis-jenis pidana yang kemudian dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan²⁵.

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda dan tutupan. Pidana denda terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan Hakim .

e. ***Pidana Mati***

Pidana mati menurut wikipedia bahasa Indonesia adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa

²³ *Ibid.* hlm.54

²⁴ Sathochid Kertanegara, 1994. *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa, hlm.49

²⁵ Adami Chazawi. *Op.cit*, hlm. 25-28

pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya²⁶. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah. Secara eksplisit peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi pidana mati secara jelas, namun Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, pidana mati dilaksanakan oleh regu penembak yang diperintahkan oleh Komandan regu penembak untuk membidik jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya kebawah secara cepat dan memberikan perintah untuk menembak.

f. ***Pertimbangan Hakim***

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa

²⁶Bonaditya, *Hukuman Mati*, di https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati diakses tanggal 30 Januari 2016 Pukul 11.39

tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum²⁷.

g. Putusan Hakim

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP menyatakan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut Van Bemmelen, putusan pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana²⁸.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian studi kasus ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak pada pengamatan atau studi dokumen tentang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tentang penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa Rani Andriani.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat

²⁷ Lilik Mulyadi, *Op.cit.* hlm.219

²⁸ Andi Hamzah, 2011. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 286

deskriptif, yaitu memaparkan hasil pengamatan dan studi dokumen tentang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tentang penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa Rani Andriani.

3. Sumber data

a. Penelitian Lapangan

Dalam hal penelitian lapangannya, penulis sudah melakukan pra penelitian ke Pengadilan Negeri Tangerang dan penelitian ke Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Padang. Pra penelitian tersebut dilakukan guna memperoleh data-data berupa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang agar dapat dianalisa. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan kasus yang penulis analisis.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini, Penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang terdapat pada :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
3. Perpustakaan Daerah Kota Padang

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam Penulisan ini terdiri atas :

- a) **Data primer** adalah data yang memiliki otoritas, data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim²⁹.

²⁹ Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47

b) **Data sekunder** adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi . Publikasi tersebut berupa buku-buku teks yang membicarakan tentang permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Hakim³⁰.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain.

Bahan hukum tersier (non hukum) adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan yang merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku, peraturan-peraturan, dan

³⁰*Ibid*, hlm. 54

berka-berkas yang ada, serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing, Karena dalam pengumpulan data tidak seluruh data yang dikumpulkan dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari semua data yang terkumpul.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif artinya uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tidak mempergunakan angka-angka tetapi dipaparkan dengan kalimat yang dapat dimengerti dan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.

